

Perempuan dalam Politik: Refleksi dari Malaysia

WAN AZIZAH

KAUM PEREMPUAN MELIPUTI SEPARUH DARI JUMLAH UMAT MANUSIA DI DUNIA, dan oleh karena itu setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi, di dalam keluarga, hingga ke tingkat masyarakat atau kehidupan publik seharusnya senantiasa memperhatikan serta melibatkan peranserta kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hak-hak politik, sosial dan ekonomi perempuan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari seluruh kerangka hak asasi mereka. Demokrasi adalah sebuah proses inklusif, dan oleh karenanya di dalam kehidupan demokrasi yang sehat semua pandangan atau perspektif dari berbagai kelompok kepentingan harus dipertimbangkan secara seksama dalam tahap perumusan tiap-tiap keputusan. Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan.

Namun, jangankan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, keterwakilan kaum perempuan di dalam institusi-institusi politik justru sangat minimal. Berbagai tantangan dan kendala menghadang para perempuan yang masuk kedalam panggung politik. Diantaranya adalah kurangnya dukungan partai, dukungan keluarga serta masih kentalnya iklim perpolitikan yang menonjolkan unsur-unsur kekelakian (*masculine model*). Banyak pihak merasa bahwa masyarakat Malaysia masih agak didominasi oleh kaum laki-laki, dan

tidak sedikit laki-laki yang merasa terancam oleh kenyataan bahwa ada perempuan yang menjabat pos-pos senior dalam perpolitikan. Dalam dunia politik, kondisi ini diperparah oleh ide bahwa kekuasaan politik adalah segala-galanya. Hal ini membuat banyak laki-laki semakin enggan berbagi kekuasaan dengan perempuan. Didasarkan pada pengalaman bangsa Malaysia, studi kasus ini akan membahas beberapa kendala yang menghalangi peranserta perempuan di parlemen, serta mengajukan beberapa strategi untuk mengatasinya.

Konteks Malaysia

Negara Malaysia adalah sebuah federasi yang terdiri atas 13 negara bagian dan tiga wilayah federal. Dari negara bagian tersebut, sembilan diperintah oleh sultan-sultan Melayu, dan empat lainnya diperintah oleh gubernur yang diangkat oleh Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung (YDPA). YDPA dipilih di antara para sultan Melayu oleh Dewan Penguasa yang beranggotakan para sultan itu sendiri. Posisi Raja Malaysia itu dipegang secara bergiliran oleh para sultan Melayu dalam satu periode selama lima tahun. YDPA memegang pemerintahan sesuai arahan perdana menteri, sedangkan para sultan memerintah negeri mereka masing-masing dengan bantuan nasehat dari para menteri utama. Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer, dan perdana menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung secara reguler setiap lima tahun. YDPA saat ini merupakan yang ke-12 sejak kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Ketika baru merdeka, Malaysia terdiri atas 11 negara bagian¹ dan disebut *Persekutuan Tanah Melayu* (Federasi Malaya). Kemudian pada tahun 1963 negara Sarawak dan Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia.

Kaum perempuan melebihi 50 persen dari total penduduk Malaysia yang berjumlah 23 juta orang. Malaysia yang dikenal sebagai negara multi-etnis dan kaya khazanah budaya itu memiliki kurang lebih 30 kelompok etnis.² Kurang dari 8 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan sebelum krisis ekonomi tahun 1997; tingkat kemampuan baca tulis di atas 85 persen dan harapan hidup warga masyarakatnya setara dengan negara-negara maju. Malaysia memiliki sistem parlemen bikameral, yakni Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu, sedangkan

para anggota Dewan Negara diangkat oleh negara-negara bagian atau langsung ditunjuk oleh YDPA berdasarkan masukan dari perdana menteri.

Barisan Nasional (*National Front* atau BN), yang merupakan koalisi dari sekitar 15 partai politik yang terbentuk pada tahun 1974 menyusul pecahnya kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969, memegang kendali pemerintahan. Anggota-anggota inti BN, yakni *United Malays National Organisation* (UMNO) dan *Malaysian Chinese Association* (MCA) serta *Malaysian Indian Congress* (MIC) yang sebelumnya pernah membentuk Parti Perikatan (Alliance Party) (1955-1974) telah lama memegang kendali pemerintahan sejak awal kemerdekaan Malaysia. Meskipun Barisan Nasional demikian kuat menguasai peta politik dan parlemen Malaysia dengan rekor fantastis duapertiga suara mayoritas atau lebih, namun Malaysia juga memiliki partai-partai politik yang tak dapat dipandang sebelah mata, termasuk diantaranya Parti Islam SeMalaysia (PAS), *Democratic Action Party* (DAP), Parti Rakyat Malaysia (PRM) dan yang baru saja terbentuk pada tahun 1999, Parti keADILan Nasional (keADILan).

Perempuan dalam Dunia Politik Malaysia

Pada tahun 2002, negara Malaysia memiliki tiga tokoh perempuan yang memegang jabatan menteri: Menteri Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga, Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian, dan Menteri Kesejahteraan dan Persatuan Nasional. Di samping itu, banyak pula perempuan yang memegang jabatan penting di pemerintahan, termasuk diantaranya para wakil menteri, sekretaris politik, diplomat, pejabat negara senior, anggota-anggota majelis negara-negara bagian, dan para senator di Dewan Negara. Di Dewan Rakyat, saat ini terdapat 20 perempuan Anggota Parlemen dari total 193. Jika jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen itu dijadikan indikator, maka bisa dikatakan bahwa peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam perpolitikan Malaysia sangatlah lambat.

Akan tetapi, kehadiran kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Malaysia masih jauh dari cukup. Banyak pemuka perempuan yang membicarakan kesetaraan gender dalam konteks ini. Pada saat ini, kaum perempuan masih sangat kurang keterwakilannya di dalam institusi-institusi politik di Malaysia.

Tabel 14: Tokoh Perempuan Anggota Parlemen Malaysia dari 1955 hingga 1999

Tahun Pemilu	1955	1959	1964	1969	1974	1978	1982	1986	1990	1995	1999
Total kursi di Parlemen	52	104	104	144	154	154	154	177	180	192	193
Jumlah perempuan di Parlemen	1	3	3	2	5	7	8	7	11	15	20
Persentase	2.00	2.90	2.90	1.38	3.25	4.54	5.19	3.95	6.11	7.80	10.36

Sumber: Rashila Ramli, 2000. "Modernisasi Politik: Ke Arah Kesetaraan Gender dalam Penyertaan Politik?" Dalam Abdul Rahman Embong, red. *Negara, Pasaran dan Pemodenan Malaysia*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 198-213.

Sekurangnya ada lima faktor yang menjadi kendala bagi peranserta aktif kaum perempuan Malaysia dalam dunia politik: diskriminasi subliminal terhadap perempuan; kendala waktu; adanya anggapan bahwa "tempat perempuan adalah di rumah"; sikap apatis bawaan dan kecenderungan menghindari politik dan kurangnya dukungan sumber daya.

Menurut Rashila dan Saliha³ paling tidak ada lima faktor umum yang menjadi kendala bagi peranserta aktif perempuan Malaysia dalam perpolitikan. Mereka mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut sebagai diskriminasi sosial terhadap peranan perempuan dalam kehidupan publik, kendala waktu yang disebabkan oleh tuntutan karir dan rumah tangga, argumen-argumen kultural dan religius yang menyatakan bahwa tempat bagi perempuan adalah di rumah, kendala struktural di dalam setiap partai politik yang tidak memungkinkan kaum perempuan melampaui level karir politik tertentu, serta kurangnya dukungan sumber daya, baik yang berupa dukungan organisasi, pengaruh, dan dana. Bertolakbelakang dengan miskonsepsi umum, sesungguhnya ada sebuah pemahaman konsep Islam yang memungkinkan orang menghargai kemungkinan-kemungkinan ke arah "pembebasan kaum perempuan" berdasarkan isi ajaran agama tersebut. Dalam banyak kasus, agama telah memberdaya dan memungkinkan kaum perempuan mencapai serta mewujudkan potensi dan kemampuan mereka sama dengan kaum laki-laki. Pengalaman kaum perempuan di Malaysia di penghujung pergantian abad yang lalu membuktikan hal ini.

Perempuan Muslim dan Reformasi

Di masa silam, perempuan Melayu banyak yang aktif berpartisipasi dalam urusan publik. Dulu pernah ada tokoh bernama Che Siti Wan Kembang yang menjadi penguasa Kelantan di pantai timur semenanjung Malaysia (Ratu Kerajaan Melayu Petani) pada abad ke-17. Sejarah menunjukkan adanya perempuan-perempuan Melayu yang menjadi ratu atau penguasa Negara Aceh dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sebagai contoh adalah Ratu Shafiuddin, putri Sultan Iskandar Thani, yang naik tahta menyusul kematian suaminya, Sultan Iskandar Muda. Sesungguhnya Aceh pernah secara berturut-turut diperintah oleh ratu selama 50 tahun sesudahnya. Di pulau Maluku dan Sulawesi ada lagi seorang perempuan yang menjadi penguasa negara.

Satu abad silam, tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Syed Sheikh Al Hadi, Sheikh Tahir Jalaluddin dan sejawatnya dalam gerakan Islam progresif yang terkenal dengan nama Kaum Muda, menyebarkan gagasan bahwa gadis-gadis Muslim harus mendapatkan pendidikan terbaik sejajar dengan anak laki-laki.⁴ Meski awalnya gagasan-gagasan itu ditentang oleh para tokoh konservatif, secara umum masyarakat Melayu menyambut ajakan itu dengan tangan terbuka. Jadi, masyarakat Muslim Melayu jauh sebelum kemerdekaan sudah menerima sikap liberal terhadap kaum perempuan, dan mendukung atmosfer keterbukaan yang mendukung pendidikan dan peranserta perempuan dalam kehidupan publik. Sejak saat itu, semakin banyak saja perempuan yang aktif di sektor publik dan swasta yang meraih kedudukan senior.

Oleh karenanya, berbeda dengan negara-negara lain, sesungguhnya tidak ada kebingungan atau letupan konflik signifikan yang menyangkut peranan perempuan di Malaysia. Masyarakat Malaysia cukup beruntung karena pernah memiliki para pemikir dan pemuka agama yang sejak lebih dari seabad silam telah merintis jalan bagi kemajuan kaum perempuan. Dalam berbagai hal, agama Islam telah memberdaya dan memungkinkan kaum perempuan mencapai potensi dan kemampuan tertinggi mereka seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan, kelompok perempuan Malaysia yang paling aktif dan paling kental afiliasi politiknya adalah kelompok Muslim Melayu.⁵

Setelah kemerdekaan, perempuan Malaysia pertama yang menjadi menteri adalah Fatimah Haji Hashim yang diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat oleh perdana menteri pertama, Tengku Abdul Rahman. Perempuan cenderung diangkat menjadi menteri untuk urusan yang “sesuai” dengan kodrat mereka, misalnya di Kementerian Kesejahteraan, Kementerian Urusan

Perempuan dan Pembangunan Keluarga, atau ke dalam posisi menteri muda di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang sekarang dilebur menjadi Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Kesenian.⁶

Satu-satunya tokoh perempuan yang memegang kedudukan sebagai menteri senior adalah Rafidah Aziz yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian pada tahun 1987. Bahkan kini, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki, proporsi menteri atau wakil menteri perempuan di Malaysia masih sangat minimal dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju.⁷

Di Malaysia tidak berlaku sistem kuota untuk meningkatkan keterwakilan politik bagi perempuan. Di tingkat partai, misalnya, kaum perempuan baru-baru ini saja mulai menduduki berbagai posisi penting. Di dalam dewan tinggi UMNO yang sedang berkuasa itu hanya ada satu anggota perempuan yang terpilih dari total 40 anggotanya, sementara di Partai KeADILan ada delapan perempuan yang menjabat di Dewan Pimpinan Pusat. Selain kedelapan perempuan yang terpilih untuk menduduki struktur pengambilan keputusan partai tersebut (termasuk di dalamnya presiden dan bendahara nasional), di dua negara bagian (Sabah dan Sarawak) Partai KeADILan juga diketuai oleh perempuan.⁸

Namun demikian, yang jauh lebih penting adalah krisis ganda politik dan ekonomi yang melanda Malaysia pada bulan September 1998⁹ yang telah menjadi unsur katalisator yang memperkuat tuntutan masyarakat luas akan adanya perubahan atau *reformasi*. Peristiwa demi peristiwa itu juga kian menyadarkan kaum perempuan untuk lebih aktif dalam urusan sosio-ekonomi dan politik di negara tersebut. Ini dapat dibuktikan oleh kehadiran dan peranan aktif perempuan dalam gerakan *reformasi* yang marak sejak tahun itu. Nampak nyata bahwa perempuan telah memainkan peranan yang setidak-tidaknya setara dengan laki-laki dalam menghidupkan program-program dalam memperjuangkan reformasi atau perubahan menyeluruh itu.

Perempuan memainkan peranan yang penting dan aktif dalam gerakan reformasi; hal mana menyadarkan mereka untuk lebih giat berpartisipasi dalam masalah sosio-ekonomi dan politik di negaranya.

Setelah tiga tahun gerakan reformasi digulirkan, kita masih terus menyaksikan peranan yang dipegang oleh kaum perempuan dalam menjaga perjuangan mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka, adil dan setara. Semangat dan

konsistensi mereka yang menyala-nyala dalam memperjuangkan cita-cita tersebut telah memupus ungkapan klise yang menyudutkan perempuan sebagai mahluk rapuh dan mudah goyah. Tekad bulat dan tidak kenal menyerah kaum perempuan dalam perjuangan ini telah melahirkan persatuan yang alamiah atau sinergi dalam menggalang kekuatan dan semangat untuk mewujudkan pranata masyarakat dan pemerintahan yang lebih adil di Malaysia.

Untuk maksud tersebut memang perlu disusun sebuah agenda alternatif yang di dalamnya terdapat upaya pemberdayaan perempuan agar dapat mewujudkan potensi mereka untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan pribadi mereka maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini perlu dibentuk suatu forum alternatif yang bukan hanya slogan semata, dan bukan cuma memanfaatkan perempuan sebagai asesori mesin politik untuk meraup suara terbanyak dalam pemilu lima tahunan. Dengan adanya pemberdayaan untuk mewujudkan potensi maksimum mereka, maka kaum perempuan pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Ini semua dapat terwujud tanpa sedikitpun melanggar kewajiban-kewajiban sosial, kultural dan keagamaan yang melekat pada diri setiap perempuan.

Meskipun kedudukan perempuan dalam politik merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan, perlu diingat peranan-peranan lain yang dibawakan perempuan di dalam masyarakat. Pengalaman bangsa Malaysia menunjukkan bahwa diskusi tentang peranan perempuan di dalam politik tidak hanya terbatas pada masalah keterwakilan mereka di dalam institusi-institusi formal. Ada banyak perempuan yang setelah menamatkan studi sarjana mereka malah memilih mengurus rumah tangga. Meski mereka tidak memegang posisi formal yang relevan dengan bekal pendidikan dan gelar yang disandanginya, sesungguhnya mereka juga memberi kontribusi bagi pembangunan masyarakat dengan membesarkan anak-anak mereka dalam tatacara dan suasana yang lebih maju.

Definisi umum demokrasi dan politik umumnya memang tidak “bersahabat” terhadap perempuan. Upaya menyelaraskan ide demokrasi dan kesetaraan gender memang masih perlu dikembangkan lebih jauh.

Kendala-kendala yang Dihadapi Perempuan di Parlemen

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh perempuan yang memasuki gelanggang politik Malaysia, membuat banyak di antara mereka takut melibatkan diri ke dalam politik.

Beban Ganda

Kaum perempuan sendiri memang banyak yang kurang tegas dan sering terpaksa memikul beban ganda, yakni harus pandai-pandai menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dengan persoalan-persoalan karir, sehingga banyak di antaranya yang terbelit kesulitan besar, kecuali mereka yang benar-benar kuat dan tegar mencapai ambisinya. Syukurlah, generasi muda kini menunjukkan sikap yang lebih toleran, dan kaum laki-laki pun sekarang banyak yang mau memperlakukan perempuan sebagai rekanan baik dalam urusan keluarga maupun dalam profesi. Karena kebanyakan pemimpin politik di Malaysia sudah berusia agak lanjut, boleh jadi diperlukan beberapa tahun lagi untuk menyaksikan perubahan positif yang sama di level politik tertinggi.

Partai Politik

Karakter dan ciri partai-partai politik yang banyak menimbulkan kendala bagi keterlibatan perempuan di dalam politik. Secara umum biasanya partai-partai yang berkuasa dan mapan akan mempertahankan sikap konservatif dan tidak mau melihat serta menyesuaikan diri dengan arus perubahan radikal yang menggejolak di dalam masyarakat. Hanya partai-partai politik alternatif atau partai oposisi yang dinamis yang mau memberikan peluang dan kesempatan lebih besar kepada perempuan. Juga, banyak partai politik yang kekurangan sumberdaya untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan, bahkan bagi para anggota perempuannya, dikarenakan adanya berbagai tekanan yang diberlakukan oleh yang berwenang.

Lingkungan yang tidak bersahabat terhadap perempuan

Sungguh menyedihkan melihat banyak anggota parlemen dan dewan perwakilan negara-negara bagian perempuan yang masih mengalami pelecehan seksual, baik yang berupa komentar-komentar miring maupun lontaran seloroh yang menyinggung perasaan dalam sidang-sidang parlemen maupun rapat dewan-dewan perwakilan tersebut. Sejauh ini belum ada tindakan efektif untuk mengatasi praktik buruk ini, dan para anggota parlemen baik laki-laki maupun

perempuan juga belum berhasil menyatukan upaya untuk mengubah situasi ini. Faktor lain yang menyebabkan kaum perempuan gamang menjamah ajang politik adalah adanya anggapan salah kaprah bahwa politik adalah dunia lelaki, disamping mereka juga kerap takut oleh pekatnya kemunafikan dan permainan-permainan kotor khas dunia politik.

Strategi-Strategi Membuka Akses bagi Perempuan ke Dunia Politik

Melihat kondisi seperti dipaparkan di atas, perlu dijejaki berbagai strategi yang dapat ditempuh kaum perempuan untuk memasuki wilayah publik dengan sistem sosio-politiknya yang masih didominasi kaum laki-laki. Ada beberapa tokoh perempuan yang berhasil melintasi batas gender dan berkiprah di “jagad” agresif yang didominasi oleh kaum laki-laki. Bisakah perempuan lain belajar dari contoh ini? Perlu diperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang berhasil itu kebanyakan berasal dari latar belakang elite politik. Latar belakang dan kelas sosial yang merupakan asal usul mereka itulah yang menjadi faktor utama keberhasilan mereka memasuki sistem politik. Namun demikian, kita dapat melihat apakah gerakan sosial politik dalam memberikan peluang bagi perempuan untuk memanfaatkan kiat-kiat tertentu yang bisa mereka pakai untuk menembus hierarki gender dalam perpolitikan.

Berbagai bentuk dukungan dari masyarakat memang diperlukan untuk mengembangkan peranan perempuan dalam politik, dan sudah banyak kisah sukses seputar hal ini di Malaysia.

Yang terpenting adalah kesadaran politik. Perempuan Muslim konvensional yang selama ini relatif tenggelam dalam kancah publik tiba-tiba saja memenuhi rapat-rapat umum dan mengorganisir kampanye-kampanye yang bertema hak-hak perempuan, hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan hak demokrasi mereka. Yang paling menonjol adalah perempuan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan berbagai organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) gerakan masyarakat seperti Tenaganita dan Suaram.

Kedua adalah pendidikan yang akan membentuk opini perempuan yang bernas dan kompeten. Yang ketiga, sekarang sudah banyak tokoh perempuan yang memegang posisi senior di sektor pelayanan publik. Kondisi ini menjamin diterimanya masukan dari kaum perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah.

Banyak oronop yang menjalin aliansi dengan KeADILan dan Barisan Alternatif (BA), yang merupakan koalisi dari partai-partai oposisi seperti KeADILan, PAS, DAP dan PRM, yang terbentuk selama pemilu tahun 1999 yang diwarnai persaingan sengit. Hajjah Zainon Jaafar (ABIM), Fuziah Salleh (JIM), Irene Fernandez (Tenaganita) dan Zaiton Kasim (*Women's Candidacy Initiative*) ditunjuk untuk mencalonkan diri dengan dukungan platform politik dari BA. Perpaduan antara aktivis-aktivis masyarakat dengan partai-partai politik dipandang sebagai ciri “politik baru” di Malaysia era pasca-1998.

Perlu juga diingat untuk jangan hanya mempersoalkan bagaimana cara meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen; yang lebih penting lagi adalah memberikan contoh dan pengalaman nyata bagaimana kaum perempuan dapat mempengaruhi proses politik pada saat mereka bekerja di dalam struktur parlemen.

Seperti halnya negara lain, Malaysia memerlukan keseimbangan perwakilan laki-laki dan perempuan di dalam panggung publik – termasuk juga di dalam perpolitikan – sehingga kaum perempuan dapat ikut berperanserta di dalam proses pengambilan keputusan tingkat tinggi. Dengan adanya perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi bukan saja menjamin tersalurkannya isu-isu yang secara umum dipandang sebagai “urusan perempuan”, namun juga menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan perempuan yang merupakan separuh dari total populasi penduduk, akan mendapat bobot dan perhatian yang selayaknya. Lebih dari itu, kehadiran perempuan di dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi akan membuat sudut pandang perempuan lebih didengar dan dihargai dalam proses-proses musyawarah, sehingga di masa depan dapat menggalang konsensus nasional ke arah terwujudnya masyarakat yang adil, terbuka, jujur dan sederajat. Tanpa kehadiran yang cukup signifikan, jika tidak proporsional, di dalam sebuah sistem politik – yakni representasi awal (*threshold representation*) - kemampuan sebuah kelompok dalam memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan atau membangun kerangka politik, akan sangat terbatas.

Sebuah Kredo tentang Politik

Sebagai catatan pribadi, saya ingin mengakhiri tulisan saya ini dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya saya tidak pernah berkeinginan ataupun bermimpi untuk menduduki posisi saya sekarang dalam memperjuangkan perubahan di masyarakat. Beberapa komentator politik mengatakan bahwa posisi saya sangat unik dan disebabkan oleh sebuah kondisi luar biasa yang menimpa Malaysia tatkala peristiwa tahun 1998 mendorong masyarakat meneriakkan tuntutan *reformasi* atau perubahan.

Pengalaman bangsa Malaysia telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung menunjukkan perhatian besar pada perpolitikan pada saat pecah krisis. Sesungguhnya perempuan Malaysia telah memberikan reaksi sangat keras terhadap berbagai insiden yang melatarbelakangi penganiayaan politis terhadap pemimpin oposisi. Salah satu aspek yang patut disyukuri dari kepopuleran Partai KeADILan adalah bahwa sebagian besar pendukungnya adalah perempuan. Sebagai anak, saudari, istri dan ibu, mereka dapat serta-merta berempati dengan korban-korban penganiayaan. Sebagai seorang politisi “kebetulan” saya setuju dengan pandangan bahwa perjuangan menegakkan keadilan harus terus dihidupkan jauh di atas kepentingan pemilu yang hanya sekali dalam setiap lima tahun.

Tekad menegakkan keadilan harus diperjuangkan dengan gigih sepanjang waktu sampai akhirnya terwujud sebuah pemerintahan dan tatanan masyarakat baru yang tidak hanya selaras dengan keadilan namun juga harga diri rakyat. Meskipun kiprah saya di dalam perpolitikan memang tidak disengaja ataupun direncanakan, namun semua orang memiliki hak untuk memanfaatkan arena politik pemilihan untuk memperjuangkan cita-citanya. Cita-cita saya adalah keadilan, terutama bagi kaum perempuan, serta semua kelompok dalam masyarakat yang direnggut hak-hak politiknya dan dipinggirkan. Saya setulusnya percaya pada kisah-kisah akbar yang ditoreh dalam sejarah, bahwa pengembaraan ribuan mil harus dimulai dengan sebuah langkah awal. Pepatah Cina mengatakan bahwa gunung yang tinggi dibangun dari jutaan kerikil, dan bahwa samudera luas terdiri atas berjuta-juta tetes air. Pendek kata, apapun nanti kendala dan gangguan yang menghadang di hadapan kami, semua perempuan Malaysia akan serentak menjawab dengan paduan suara kemanusiaan: kami pasti menang.

Catatan

- 1 Negara-negara bagian seperti dimaksud adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, dan Kelantan.
- 2 61 persen adalah bumiputra yang terdiri atas 50 persen suku Melayu yang tinggal di Semenanjung Malaysia yang keseluruhannya Muslim, sementara 11 persen lainnya adalah campuran antara Muslim, Kristen (mayoritas), pemeluk animisme yang merupakan suku pribumi Sabah dan Sarawak. Sebanyak 30 persen adalah etnis Cina, 9 persen keturunan India sementara sisanya adalah non-Muslim.
- 3 Ramli, Rashila dan Saliha Hasan. 1998. "Trends and Forms of Women's Participation in Politics." Dalam Sharifah Zaleha Syed Hassan, red. *Malaysian Women In The Wake of Change*. Kuala Lumpur: Gender Studies Programme, Universiti Malaysia, hal. 88-104.
- 4 Tokoh-tokoh tersebut adalah pemuka agama tersohor dan intelektual berpikiran maju yang mengenyam pendidikan di Al-Azhar University di Kairo. Saat masih belajar di Kairo, mereka menerima pemikiran-pemikiran reformis dan universalis antara lain dari Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan Jamaluddin al-Afghani.
- 5 Sebagai contoh, pada masa menjelang kemerdekaan nasional pada tahun 1957 di antara tokoh-tokoh itu termasuk pula Shamsiah Fakeh yang memimpin Angkatan Perempuan Sedar (AWAS) menjelang masa pendudukan Jepang hingga organisasi tersebut oleh pemerintah Inggris dinyatakan sebagai gerakan terlarang pada tahun 1948, serta tokoh-tokoh perempuan lain di sayap UMNO seperti Khatijah Sidek, Ibu Zain, Aishah Ghani dan Fatimah Hj Hashim. Fatimah adalah menteri perempuan pertama pada era Malaysia merdeka.
- 6 Menteri-menteri yang dimaksud adalah: Menteri Kesejahteraan – Fatimah Hj Hashim, Aishah Ghani, Napsiah Omar (Wakil Menteri); Kementerian Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga – Shahrizat Jalil; Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga – Rosemary Chong (Wakil Menteri), di kementerian yang sekarang berubah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Seni – Ng Yen Yen (Wakil Menteri).
- 7 Nampaknya perempuan-perempuan yang ditunjuk menduduki jabatan eksekutif pemerintah itu dianggap sebagai penerima "hadiah" dari partai yang berkuasa atas jasa mereka dalam menggalang dukungan pemilih perempuan di dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, penunjukan beberapa tokoh perempuan itu dianggap bukan karena kemampuan pribadi maupun kapabilitas profesional yang bersangkutan.
- 8 Termasuk Dato' Hafsa Harun (mantan menteri negara) dan Datin Saidatul Badru (putri seorang mantan menteri utama dan gubernur) yang merupakan pemimpin-pemimpin keADILan masing-masing untuk wilayah negara bagian Sarawak dan Sabah.
- 9 Termasuk dalam hal ini pemecatan mendadak terhadap Anwar Ibrahim dari kedudukannya sebagai wakil perdana menteri, serta penganiayaan fisik oleh Inspektur Jenderal Polisi yang dialaminya dua minggu sesudah peristiwa itu secara berturut-turut, pada saat kedua matanya ditutup dan kedua tangannya diborgol ke belakang.